EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

PUTRI WIJAYANTI

NIT. 22314165

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAC

This study aims to analyze the effectiveness of the Weekend Land Service Program (PELATARAN) implemented at the Bogor Regency I Land Office in West Java Province, as well as to identify the factors influencing its implementation. The PELATARAN program is a public service innovation from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), designed to accommodate applicants who are unable to process land administration documents during regular working hours (Monday–Friday) by offering priority services on Saturdays and Sundays. This research employs a quantitative method with a descriptive approach, using a questionnaire distributed to 67 respondents selected through purposive sampling, all of whom are users of the PELATARAN program at the Bogor Regency I Land Office. Effectiveness was measured using three indicators adapted from the effectiveness theories of Gibson and Richard M. Steers: goal achievement, productivity, and satisfaction. The instrument was tested for validity using the Pearson Product Moment Correlation and for reliability using Cronbach's Alpha, both of which confirmed that all items were valid and reliable. The results show that the goal achievement indicator obtained the highest average score (4.22, categorized as "very effective"), followed by the satisfaction indicator (4.18) and the productivity indicator (4.12), both categorized as "effective." The overall average score across the three indicators was 4.17, placing the implementation of the PELATARAN program in the "effective" category. Supporting factors include clear program objectives and direct handling by rights holders, while inhibiting factors include limited queue capacity, system constraints, and applicants' limited understanding of online registration and supporting applications.

Keywords: *effectiveness, public service, PELATARAN, land office, weekend service*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAC ..... **viii**
INTISARI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Batasan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
A. Kajian Literatur 7
B. Kerangka Teoritis 13
C. Kerangka Pemikiran 19
D. Hipotesis Deskriptif 21
BAB III METODE PENELITIAN **22**
A. Format Penelitian 22
B. Lokasi Penelitian 23
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 23
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 24
E. Teknik Analisis Data 29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **35**
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor 35

a. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor I 37

BAB V EFEKTIVITAS PADA PELAKSANAAN PROGRAM PLATARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 41

A. Profile Responden 41

B. Efektivitas Berdasarkan Indikator 48

C. Tingkat Efektivitas Program Pelataran Berdasarkan Indikator di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I 53

BAB VI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDIKATOR EFEKTIVITAS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLATARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I 55

A. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Efektivitas Pada Indikator 55

B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Efektivitas Pada Indikator..... 56

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 64

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar, pelayanan publik merupakan sebuah komitmen dari pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam melayani masyarakat Indonesia secara profesional serta adil, sistem birokrasi pemerintahan pada sektor publik, para pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menjunjung tinggi pelayanan berdasarkan amanat dari hukum dasar yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Nita, 2025). Sesuai dengan fungsi utamanya, pemerintahan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka permerintahan harus mempunyai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas untuk pelayanan publik yang hingga sampai saat ini pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan masih banyak menghadapi kondisi yang belum sesuai dengan fungsinya (Nuraini & Habiburahman, 2023). Kualitas pada pelayanan publik sangat bergantung tehadap kualitas dari pemberi layanan, yang dilakukan secara konsisten untuk mencukupi harapan dari penerima layanan (Bali, 2024).

Fungsi dari pelaksanaan pelayanan publik mengacu kepada peraturan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan, untuk memberikan sebuah kepastian hukum di dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya kepastian hukum tersebut yang berfungsi sebagai jaminan kepada masyarakat atau pemohon, agar kebutuhan masyarakat/pemohon terpenuhi sesuai dengan pedoman perundang-undangan (Cendana & Oktariyanda, 2022).

Pelayanan publik pada bidang pertanahan menjadi isu yang strategis, karena hampir seluruh kegiatan pembangunan serta aktivitas masyarakat membutuhkan tanah, di dalam hal ini tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijelaskan bahwa tanah

sebagai permukaan bumi yang penggunaannya berfungsi sebagai tempat permukiman atau hunian, pertanian, perdagangan, transportasi, jasa, industri, dan lain sebagainya yang dimana berbeda dengan makna penggunaan tanah di Desa, pengggunaan serta pemanfaatan tanah di perkotaan dinilai berdasarkan sisi ekonomi (Runturambi et al, 2022). Sebagaimana mestinya, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memiliki fungsi di pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan untuk pengurusan Hak Atas Tanah (HAT) yang berpedoman pada asas kehati-hatian di dalam pemeliharaan administrasi pertanahan. Menyadari hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, secara berkesinambung terus melakukan pembenahan serta perbaikan pada pelayanan untuk masyaraka atau pemohon (Runturambi et al., 2022).

Salah satu layanan yang masih sering banyak dikeluhkan oleh masyarakat atau pemohon yaitu layanan di bidang pertanahan. Permasalahan yang masih menyebabkan masyarakat atau pemohon banyak yang tidak melakukan kegiatan administrasi pertanahan atau permohonan berkas pertanahan, dikarenakan memiliki keterbatasan waktu yang digunakan untuk bekerja, antrian pelayanan pada Kantor Pertanahan yang sering penuh dan terbatas (Rachmadani & Meirinawati, 2016). Adapun tantangan layanan publik lainnya pada instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yaitu masih kurangnya dalam pengoptimalisasi kegiatan layanan kepada masyarakat dalam mengurus berkas administrasi pertanahan serta upaya untuk menghilangkan persepsi terhadap masyarakat atau pemohon bahwa pelayanan di Kantor Pertanahan sangat memakan waktu, sangat rumit, serta diperlukannya perubahan dalam birokrasi (Adikara et al., 2023).

Sudah terdapat berbagai macam inovasi layanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kantor Pertanahan, yaitu salah satu bentuk inovasinya berupa Program Pelayanan Akhir Pekan Pertanahan (PELATARAN) yang menyediakan sebuah loket pelayanan prioritas untuk masyarakat atau pemohon dan bertujuan untuk meningkatkan

serta membantu masyarakat atau pemohon dalam mengurus berkas pertanahan atau permohonan pada hari libur yang di khususkan pada hari sabtu dan minggu (Nuraini & Habiburahman, 2023). Program Pelayanan Akhir Pekan Pertanahan (PELATARAN) yang di selenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini di resmikan sejak tahun 2022 dan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang loket prioritas pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan program PELATARAN total terdapat 107 Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota yang membuka pelayanan pada akhir pekan (sabtu dan minggu) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. Melalui Program PELATARAN ini yang memberikan kemudahan dan kesempatan khusus kepada pemohon atau pemilik hak langsung untuk datang ke kantor pertanahan dan mengurus administrasi berkas permohonan pertanahan tanpa melalui perantara maupun kuasa (Nurdiana, 2025).

Kantor Badan Pertanahan Nasional pada Provinsi Jawa Barat terdiri dari 28 Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan yang mengikuti program PELATARAN sebanyak 16, salah satu diantaranya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I menjalankan program PELATARAN ini dimulai pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022. Program PELATARAN ini menyediakan beberapa jenis layanan yaitu layanan Informasi Pertanahan atau Pengecekan, Roya, Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah atau Waris), Peningkatan HGB ke HM Rumah Tinggal, Sertipikat Pengganti, Validasi, Pendaftaran Surat Keputusan (SK), Ganti Nama Hak Tanggungan, Merger Hak Tanggungan, Pengambilan Berkas, Pengukuran, Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Pertamakali, Penghapusan BPHTB terhutang, dan Blokir. Melalui pernyataan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, di wilayah kerjanya mempunyai permohonan berkas yang tergolong sangat besar setiap harinya dan hampir mencapai 600 permohonan. Permohonan berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I pada periode bulan Januari-

Maret 2026 tercatat sebanyak 34.743 permohonan dan menduduki peringkat ke dua se-Jawa Barat dalam permohonan berkas terbanyak. Dari fenomena tersebut efektivitas kelancaran dalam program PELATARAN perlu perhatian agar bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk keberlanjutan yang lebih baik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam layanan pertanahan di wilayah Jawa Barat dengan berperan pada Program PELATARAN yang merupakan sebuah inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Dengan adanya Program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pemohon yang terkendala mengurus berkas pada pelayanan hari kerja senin hingga jum'at, dapat mengurus berkas permohonannya pada hari libur atau jam operasional Program PELATARAN yang dilaksanakan dari pukul 08.00–12.00 WIB. Dengan adanya program PELATARAN ini di harapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I"** penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis lebih lanjut tentang tingkat efektivitas dari masyarakat terhadap Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di jelaskan, makan berikut merupakan rumusan masalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pada pelaksanaan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik?

2. Apasaja faktor yang mempengaruhi efektivitas pada pelaksanaan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Kabupaten Bogor I?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah di rumuskan, berikut tujuan dari penelitian:

a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pada Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki manfaat untuk peneliti serta pembaca, berikut ini merupakan manfaat dari penelitian:

a. Manfaat ilmiah, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji terkait efektivitas pelayanan publik, program PELATARAN, dengan demikian serta inovasi pelayanan pertanahan.

b. Manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

   a) Untuk Kementerian ATR/BPN, penelitian ini bisa dijadikan untuk sebuah referensi ilmiah terkait dengan Program PELATARAN;

   b) Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pelaksanaan program PELATARAN;

c) Untuk Politeknik Agraria STPN, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan keilmuan dalam penelitian serta pengetahuan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan publik serta program PELATARAN;

d) Untuk peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan ilmu dalam pelayanan publik maupun pada program PELATARAN di bidang pertanahan.

c. Manfaat sosial, pada penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan informasi-informasi serta pengetahuan kepada pemohon ataupun masyarakat dalam pelaksanaan program PELATARAN.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yang membuat fokus kepada permasalahan yang akan dihadapi dalam menganalisis efektivitas dari Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, berikut batasan masalah pada penelitian:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Provinsi Jawa Barat;
2. Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan menjadi fokus utama didalam penelitian ini untuk meninjau seberapa jauh efektivitas dari tiga indikator pada Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
3. Penelitian ini hanya untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dengan menggunakan teori efektivitas Gibson dan Richard M Strees pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap wujud inovasi pelayanan publik yaitu Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, berikut merupakan hal-hal yang dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I telah memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kualitas layanan publik. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I ikut serta dalam program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu. Hadirnya program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dapat membantu masyarakat yang kesulitan mengurus berkas pada hari Senin-Jum`at, hal ini terbukti pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa program Pelataran berjalan dengan efektif berdasarkan penilaian dari pengguna program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diantaranya, kejelasan tujuan dari program Pelataran sebagai solusi untuk masyarakat yang hanya mempunyai waktu untuk mengurus berkas pertanahan padah hari libur, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, sikap dan kinerja petugas dalam melayani masyarakat, perlindungan hukum yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melegalitaskan hak mereka dan menghindari pungli karena program Pelataran di khususkan untuk pemohon mengurus berkasnya secara langsung tanpa adanya pihak lain.

B. Saran

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, peneliti akan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi kedepan, berikut merupakan beberapa saran dari peneliti:

1. Kantor Pertaahan Kabupaten Bogor I harus tetap mempertahankan kualitas layanannya terhadap program Pelataran yang telah mendapatkan kategori efektif yang dihasilkan dari penilaian masyarakat pengguna program Pelataran dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mendapatkan kepercayaan dari pengguna layanan yang lebih baik.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu mengadakan evalusi seacara berkala terhadap kendala-kendala yang masih terjadi atau dikeluhkan oleh pengguna layanan untuk menjaga kuliatas pelayanan pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka mengetahui sistem antrean bisa diambil secara offline dan online serta penggunaan aplikasi-aplikasi yang diperlukan pemohon untuk melengkapi permohona berkasnya.
4. Peningkatan pada internal Kantor, yaitu pegawai atau petugas layanan diharapkan agar bisa meningkatkan komptensinya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, agar kualitas layanan pada program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I tetap terjaga dan lebih baik.
5. Untuk peneliti selanjunya, dapat mengembangkan penelitian terkait efektivitas program Pelataran di cangkupan yang lebih luas dan tidak hanya terpacu dengan satu kantor, agar dapat mengetahui serta memberikan gambaran yang lebih luas lagi terkait dengan program pelataran sebagai wujud dari inovasi layanan publik di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adikara, Y. R., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). Implementasi Program Loket Prioritas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *3*(2).

Afriani Rama, H., & Wahyu Endarti, E. (n.d.). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, *2*, 2022.

Amin, F, N., Grancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. (Vol. 14, No. 14*).*

Astri Novita, H., Setiawan, I., Urahmah, N., & Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, P. (2024). *Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pelayanan Publik 1(2).

Bali, T, R. (2024). Dampak Program Pelataran Terhadap Peningkatan Pendaftaran Tanah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Program Pelataran (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa).

Bambang, B., Fauzi, N., Priatna, T., Agisna, M., Fathia, F., Haq, S., & Sakinah, U. D. (2025). PT. Media Akademik Publisher Memahami Dasar-Dasar Penelitian: Hakikat Metodelogi Penelitian dan Paradigma. *JMA)*, *3*, 3031–5220. https://doi.org/10.62281

Cendana, A, G., & Oktariyanda, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Publika, 1089-1100. Vol. 10, No. 4).

Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *3(3).*

Hanipah, M., & Aryani, L. (2022). Efektivitas Inovasi pelayanan Publik Berbasis E-Govetnment (Simpelin) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 10(1), 112-128.

Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. In *Syntax Admiration* (Vol. 5, Number 12).

Iskandar, F, M. (2025). Dampak Program Terhadap Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Tanah dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman).

Kharisma, D., Yuniningsih, T., Profesor, J., & Soedarto, H. (n.d.). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Retrieved http://www.fisip.undip.ac.id

Martauli, M. S., Andri., Apriansah, D., Kamaludin., & Juriani, T. Efektivitas Pelaksanaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan. Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang, M. (n.d.). *Volume 4 Nomor 2 Edisi Maret 2022*.

Maskhuliah, P., Ayu Vidiyanti, V., Dwi Jayanti Putri, A. M., Wailusu, M., & Supraman, S. (2025). Hipotesis Penelitian Dalam Statistik Manajemen Pendidikan: Konsep, Jenis, dan Prosedur Pengujian. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*, 425–433. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.600

Muchlis, A. F. (2023). Metode Penelitian Survei-Kuesioner untuk Kesesakan dan Privasi pada Hunian Asrama. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *12*(3), 154–163. https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i3.252

Nita, D, N. (2025). Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Nuraini., & Habiburahman. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Jurnal Manajemen, (Vol.13, Nomor 1).

Nurdiana, I. (2025). Implementasi Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Nurhabiba, D. F., Misdalina, M., & Tanzimah. (2023). Kemampuan Higher Order Thingking Skill (HOTS) Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi SD 19 Palembang. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri.* (Vol. 09, No.03).

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rachmadani, S., & Meirinawati. (2016). Kualitas Pelayanan *Weekend Service* (Program Layanan Akhir Pekan) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik. *Kajian Manajemen Publik,* 1(1).

Runturambi, J, M, N., Katiandagho, M, T., & Rumagit, J, A, G. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Manado. *ISSN (e) 2685-063X, Terakreditasi Jurnal Sinta 5* (Vol. 18).

Stepanus, H., & Subadi, W. (2024). Hilas stepanus. (2024). Efektivitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Kabupaten Tabalong Dalan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik. *Jurnal Stiatabalong*, 7(2). https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1070

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Skunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3). https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/238

Trianasari, N., Kencana Sari, P., & Prasetio, A. (2025). *Peningkatan Kualitas Penelitian di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling dan Besar Sampel di STFI Bandung*. *5*(1). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1152

Zahra Syahputri, A., Della Fallenia, F., Syafitri, R., Lubis, R. N., Wulan, S., & Lubis, D. (2023). Kerangka B erfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 Tentang Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan.